

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola (*governance*) secara umum mengacu pada proses, sistem, dan kebijakan yang mengarahkan dan mengendalikan aktivitas suatu organisasi atau entitas. Ini meliputi mekanisme pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, akuntabilitas, dan kerangka kerja untuk mencapai tujuan organisasi.¹ Dalam konteks ini, tata kelola merujuk pada pengelolaan dan pengaturan yang efektif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mengkoordinasikan pengembangan kawasan Taman Rimbo menjadi objek wisata yang strategis di Kota Jambi.

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sektor ini juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian masyarakat lokal, serta mempromosikan kekayaan alam dan budaya suatu daerah.² Oleh karena itu, pengembangan objek wisata potensial menjadi agenda prioritas bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya tarik wisata dan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

¹ Haris, Oheo K. "Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan." *Yuridika* 30, no. 1 (2015), hlm. 59.

² Aliansyah, Helmi, dan Wawan Hermawan. "Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat." *Bina Ekonomi* 23, no. 1 (2019), hlm. 40.

Kota Jambi, sebagai ibu kota Provinsi Jambi, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Salah satu kawasan yang menarik untuk dijadikan objek wisata strategis adalah Taman Rimbo. Kawasan ini memiliki nilai ekologis yang tinggi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan berpotensi menjadi destinasi wisata alam perkotaan yang unik di Kota Jambi.³

Taman Rimbo saat ini merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) utama di Kota Jambi yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika. Namun, potensinya sebagai objek wisata strategis belum dimanfaatkan secara maksimal. Data dari Dinas Pariwisata Kota Jambi menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Rimbo pada tahun 2023 hanya mencapai 50.000 orang, jauh di bawah potensi yang seharusnya bisa dicapai mengingat lokasinya yang strategis di pusat kota.⁴ Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi, untuk mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi memiliki peran krusial dalam pengembangan Taman Rimbo. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, TPHP memiliki kapasitas untuk mentransformasikan Taman Rimbo dari sekadar ruang terbuka hijau menjadi destinasi agrowisata yang

³ Fortuna, Dewi. "Pelaksanaan Fungsi Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi". *S1 thesis*, Universitas Jambi.

⁴ Ulfa, Maria, dan Fazriyas Fazriyas. "Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi Berbasis Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Oksigen (Public Green Open Space Development in Jambi City Based on Population and Oxygen Needs)." *Jurnal Sylva Lestari* 8, no. 3 (2020), hlm. 367.

menarik dan edukatif. Namun, berdasarkan laporan kinerja TPHP tahun 2023, belum ada program khusus yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi wisata Taman Rimbo.⁵

Manajemen strategis dalam konteks pengembangan Taman Rimbo melibatkan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang sistematis. Hal ini mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi program, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.⁶ Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan Taman Rimbo tidak hanya fokus pada aspek estetika, tetapi juga mempertimbangkan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik.

Dalam pengembangan Taman Rimbo, TPHP menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. Keterbatasan anggaran menjadi kendala serius, dengan data APBD Kota Jambi tahun 2023 menunjukkan alokasi anggaran untuk pengembangan RTH hanya sebesar 2% dari total anggaran pembangunan.⁷

Pengembangan Taman Rimbo sebagai objek wisata juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Sebagai ruang terbuka hijau, Taman Rimbo memiliki fungsi ekologis yang penting bagi Kota Jambi. Oleh karena itu, pengembangan wisata di area ini harus dilakukan dengan prinsip ekowisata yang menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan

⁵ BSIP Jambi, *BPSIP Jambi Kembali Koordinasi dengan Dinas TPHP Provinsi Jambi terkait Percepatan Areal Tanam*, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi, 11 Juni 2024, Diakses dari <https://jambi.bsip.pertanian.go.id/berita/bsip-jambi-kembali-koordinasi-dengan-dinas-tphp-provinsi-jambi-terkait-percepatan-areal-tanam>

⁶ Atmaja, Hanung Eka, dan Shinta Ratnawati. "Pengembangan pariwisata melalui integrasi perencanaan sumber Daya Manusia dengan Perencanaan Strategis objek Wisata Taman Bunga manohara." *Jurnal Jendela Inovasi Daerah* 3, no. 1 (2020), hlm. 51.

⁷ Walikota Jambi. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Jambi 2023*. LKPJ 2023.

pemanfaatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁸

Dalam pengembangan Taman Rimbo, peran serta masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan. Pendekatan pengembangan berbasis masyarakat (*community-based tourism development*) dapat diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berpartisipasi aktif dan memperoleh manfaat langsung dari pengembangan wisata.⁹ Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan atraksi wisata, penyediaan layanan pendukung, serta pelestarian lingkungan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Taman Rimbo adalah integrasi dengan sektor-sektor terkait. Kolaborasi lintas sektor antara TPHP dengan Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta *stakeholder* lainnya menjadi krusial untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan dan pengelolaan.¹⁰ Pendekatan terpadu ini dapat memaksimalkan potensi wisata sekaligus menjaga fungsi ekologis dan sosial dari ruang terbuka hijau.

Pengembangan Taman Rimbo sebagai objek wisata strategis juga harus mempertimbangkan potensinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih relatif rendah dibandingkan

⁸ Katila, Pia, Carol J. Pierce Colfer, Wil De Jong, Glenn Galloway, Pablo Pacheco, dan Georg Winkel, eds. *Sustainable development goals*. Cambridge University Press, 2019.

⁹ Nugroho, Prasetyo, dan Shinya Numata. "Resident support of community-based tourism development: Evidence from Gunung Ciremai National Park, Indonesia." *Journal of Sustainable Tourism* 30, no. 11 (2022), hlm. 2511.

¹⁰ Berliandaldo, Mahardhika, Achmad Chodiq, dan Driszal Fryantoni. "Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong." *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 4, no. 2 (2021), hlm. 222.

dengan potensi yang ada.¹¹ Pengembangan Taman Rimbo dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD melalui retribusi, pajak, dan *multiplier effect* ekonomi yang dihasilkan.

Dalam konteks pengembangan Taman Rimbo menjadi objek wisata berbasis Ruang Terbuka Hijau, tata kelola yang efektif harus didasarkan pada kerangka hukum dan regulasi yang komprehensif. Implementasi tata kelola yang baik dalam sektor pariwisata di Indonesia didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa regulasi kunci yang menjadi landasan dalam pengembangan kawasan wisata strategis termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan landasan hukum utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek kepariwisataan, termasuk hak dan kewajiban wisatawan, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah. Undang-undang ini juga menetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang berkelanjutan, seperti pelestarian alam dan budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemerataan kesempatan usaha. Selain itu, UU ini mengatur tentang kawasan strategis pariwisata, standardisasi usaha pariwisata, serta peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. *Perkembangan Pariwisata Provinsi Jambi 2016*. Badan Pusat Statistik.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025 adalah turunan dari UU Kepariwisata yang memberikan arah dan pedoman konkret dalam pengembangan pariwisata nasional. RIPPARNAS ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu 2010-2025. Peraturan ini juga menetapkan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta koridor pariwisata nasional. RIPPARNAS menjadi acuan bagi pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

Regulasi-regulasi ini tidak hanya memberikan kerangka hukum bagi pengembangan pariwisata, tetapi juga menetapkan standar dan pedoman untuk memastikan bahwa pengembangan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. Dengan berpedoman pada regulasi yang ada, pengembangan Taman Rimbo Jambi menjadi objek wisata strategis dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial budaya dari sektor pariwisata di Kota Jambi.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya pengembangan sektor pariwisata di Kota Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Tessya Yunita Siregar dan Nuriah Alfisyahri tentang "Optimalisasi dan Pengembangan Pariwisata Pasca Covid-19 di Kota Jambi" menemukan bahwa pengoptimalan dan pengembangan sektor pariwisata pasca Covid-19 dimulai

dengan cara menggerakkan kembali sektor pariwisata yang ada di Kota Jambi. Berbagai cara diantaranya dilakukan pembinaan dan pengelolaan destinasi pariwisata.¹² Hal ini menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya, namun masih memerlukan peningkatan infrastruktur, promosi, dan pengelolaan yang lebih baik.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ugi Nugraha, Roli Mardian, dan Ely Yuliawan tentang "Sosialisasi Pengelolaan Wisata Olahraga Dan Rekreasi Di Kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi" menekankan bahwa hasil dari sosialisasi ini memberi motivasi kepada para penggiat wisata untuk lebih mengembangkan wisata diwilayahnya masing-masing.¹³ Meskipun fokus pada kawasan yang berbeda dengan, namun penelitian tersebut juga mengkaji mengenai pengembangan potensi wisata di Kota Jambi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dapat memotivasi penggiat wisata untuk mengembangkan kawasan wisata dan mengubah pola pikir masyarakat serta pelaku wisata untuk berinovasi, dapat menjadi acuan penting dalam pengembangan Kawasan Pasar Jambi. Pendekatan serupa dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan dalam mengembangkan Kawasan Pasar Jambi menjadi objek wisata strategis.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yustisia Kristiana, Rosdiana Pakpahan, dan Stephanie T. Mulyono tentang "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja)"

¹² Tessya, Tessya Yunita Siregar, dan Nuri Alfisyahri. "Optimalisasi dan Pengembangan Pariwisata Pasca Covid-19 di Kota Jambi." *Tanah Pilih* 3, no. 1 (2023), hlm. 55.

¹³ Nugraha, Ugi, Roli Mardian, dan Ely Yuliawan. "Sosialisasi Pengelolaan Wisata Olahraga Dan Rekreasi Di Kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma* 1, no. 2 (2021), hlm. 142.

mengungkapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dilakukan dengan tahapan sosialisasi program, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan di Kawasan Seberang Kota Jambi, Provinsi Jambi dan diikuti oleh 20 peserta. Kegiatan yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya bagi mitra. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami materi yang diberikan.¹⁴ Pendekatan berbasis masyarakat yang diterapkan di Sekoja dapat diadaptasi untuk kawasan Pasar Jambi, mengingat kedua area ini memiliki karakteristik sebagai pusat aktivitas ekonomi dan budaya lokal. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengelolaan, pengembangan kawasan Pasar Jambi menjadi objek wisata strategis berpotensi untuk lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi komunitas lokal, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pembangunan pariwisata yang inklusif.

Ketiga penelitian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata memerlukan tata kelola yang kuat, peningkatan infrastruktur penunjang, serta pengelolaan terpadu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Pengembangan Tata Kelola Kawasan Objek Wisata Taman Rimbo Kota Jambi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP). Fokus penelitian akan diarahkan pada aspek-aspek manajemen strategis, implementasi kebijakan, serta evaluasi dan

¹⁴ Kristiana, Yustisia, Rosdiana Pakpahan, dan Stephanie T. Mulyono. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja)." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 2 (2019), hlm. 1047.

penyempurnaan program pengembangan kawasan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan sektor pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi, serta menjadi model pengembangan ruang terbuka hijau menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut sehingga mengambil judul penelitian sebagai berikut: **“Pengembangan Tata Kelola Kawasan Objek Wisata Taman Rimbo Kota Jambi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan tata kelola Kawasan Objek Wisata Taman Rimbo yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi dalam mengembangkan Kawasan Taman Rimbo menjadi Objek Wisata Strategis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengembangan tata kelola Kawasan Objek Wisata Taman Rimbo yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi dalam mengembangkan Kawasan Taman Rimbo menjadi Objek Wisata Strategis.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki dua manfaat penelitian baik pada aspek teoritis dan aspek praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pemerintahan, tata kelola ruang terbuka hijau, dan pengembangan pariwisata berbasis agrowisata. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan transformasi ruang terbuka hijau menjadi objek wisata strategis, serta dapat memperkaya literatur tentang peran dinas pemerintah dalam pengembangan wisata perkotaan yang berkelanjutan.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP)

Provinsi Jambi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Taman Rimbo sebagai objek wisata strategis. Hasil analisis tentang pengembangan dan kendala yang dihadapi dapat membantu Dinas TPHP dalam mengoptimalkan potensi wisata berbasis agro dan mengatasi hambatan yang ada dalam proses pengembangan.

b. Bagi Pemerintah Kota Jambi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah kota mengenai potensi dan tantangan dalam pengembangan Kawasan Taman Rimbo sebagai objek wisata. Informasi ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, koordinasi antar dinas, dan perumusan kebijakan yang mendukung pengembangan wisata berbasis ruang terbuka hijau.

c. Bagi Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pemangku kepentingan, seperti pengelola taman, pelaku usaha di sektor pertanian dan pariwisata, serta investor potensial, mengenai peluang dan tantangan dalam pengembangan Kawasan Taman Rimbo. Informasi ini

dapat membantu mereka dalam merencanakan keterlibatan dan investasi dalam proses transformasi kawasan.

d. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang rencana pengembangan Kawasan Taman Rimbo menjadi objek wisata strategis. Hal ini dapat mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat dalam konservasi lingkungan dan pengembangan wisata, serta mempersiapkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang mungkin muncul dari pengembangan agrowisata di kawasan tersebut.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Tata Kelola Pariwisata

Tata kelola pariwisata, atau *tourism governance*, mengacu pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata¹⁵. Konsep ini mencakup struktur, mekanisme, dan praktik yang digunakan untuk mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan destinasi wisata secara berkelanjutan.

Tata kelola pariwisata yang baik bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.¹⁶ Hal ini memerlukan pendekatan adaptif dan

¹⁵ Teguh, Frans. *Tata Kelola Destinasi: Membangun Ekosistem Pariwisata*. UGM PRESS, 2024, hlm 22.

¹⁶ Teguh, Frans. *Op. Cit.*, hlm 12.

fleksibel yang dapat merespons perubahan tren pariwisata, teknologi, dan tantangan global.

Tata kelola pariwisata merupakan proses pengelolaan destinasi wisata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam konteks penelitian, beberapa aspek kunci tata kelola pariwisata yang relevan meliputi:¹⁷

- a. Kolaborasi Antar-Lembaga. Kerjasama antara Dinas TPHP dengan dinas atau lembaga lain yang terkait dengan pengembangan pariwisata.
- b. Perencanaan Terpadu. Pengembangan rencana strategis yang mengintegrasikan aspek pertanian, peternakan, dan pariwisata dalam pengelolaan Taman Rimbo.
- c. Manajemen Sumber Daya. Pengelolaan sumber daya alam dan fasilitas di Taman Rimbo untuk mendukung kegiatan wisata berbasis agro.
- d. Pemberdayaan Masyarakat. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata Taman Rimbo.
- e. Inovasi Produk Wisata. Pengembangan atraksi dan pengalaman wisata yang menggabungkan unsur pertanian, peternakan, dan rekreasi.

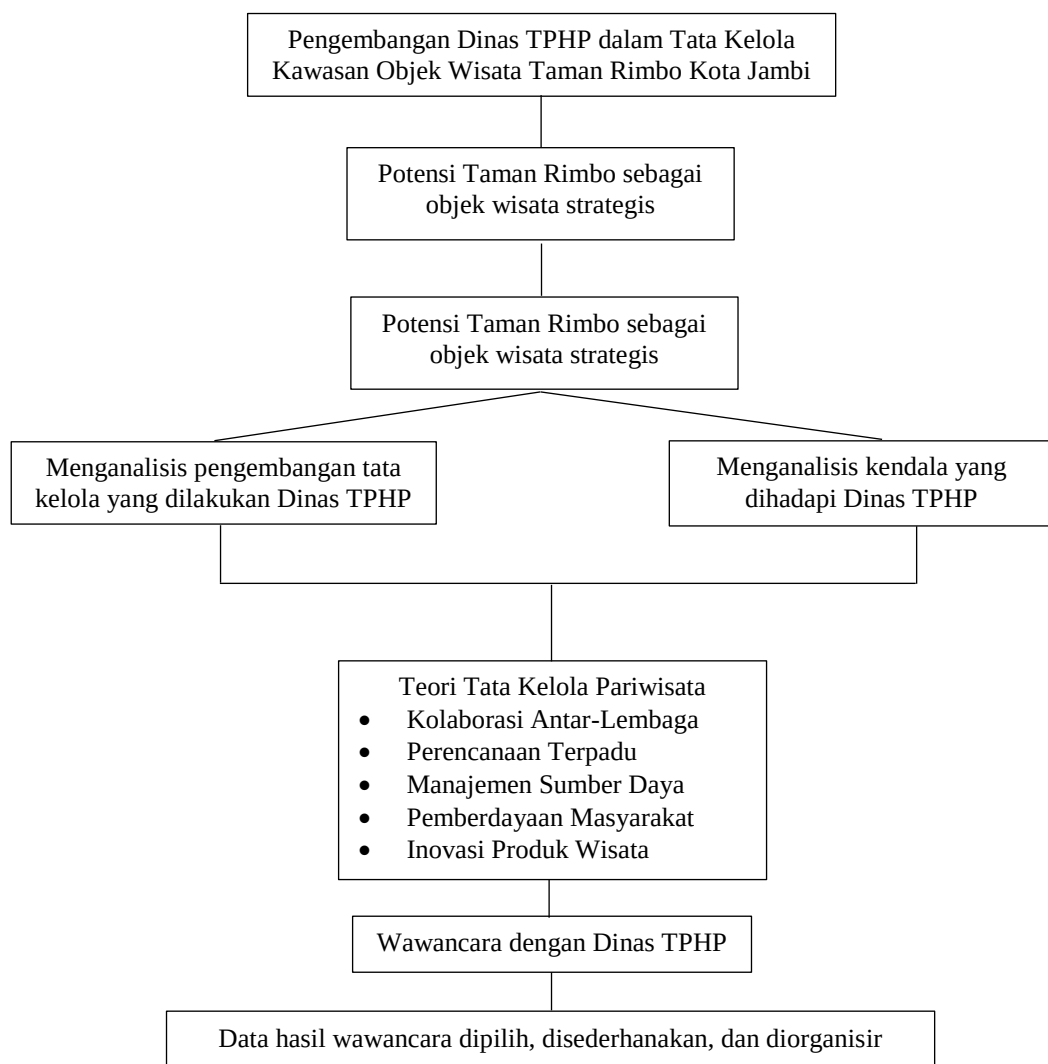
Kelima aspek ini mencakup elemen-elemen penting dari tata kelola pariwisata yang langsung berkaitan dengan peran Dinas TPHP dalam pengembangan Taman Rimbo sebagai objek wisata. Pendekatan ini memungkinkan fokus yang lebih tajam pada interaksi antara sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata dalam konteks perkotaan.

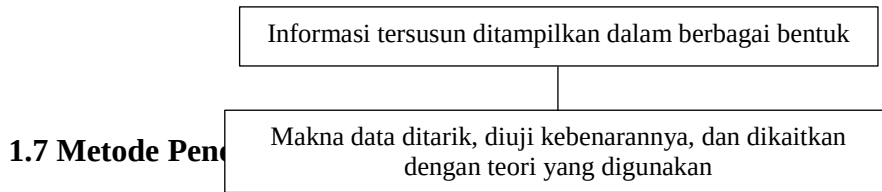
¹⁷ Teguh, Frans. *Op. Cit.*, hlm 24.

Dalam konteks Pengembangan Tata Kelola Kawasan Objek Wisata Taman Rimbo Kota Jambi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP), teori tata kelola pariwisata sangat relevan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pariwisata diterapkan dalam pengembangan Taman Rimbo sebagai objek wisata, dengan fokus khusus pada peran Dinas TPHP.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir





1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan metodologis yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, dengan fokus pada interpretasi makna dan pengalaman subjektif.¹⁸ Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Tata kelola Taman Rimbo oleh Dinas TPHP merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kerumitan ini secara holistik.
- b. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan pandangan para pemangku kepentingan terkait pengembangan Taman Rimbo.
- c. Penelitian kualitatif menawarkan fleksibilitas dalam pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode sesuai

¹⁸ Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019, hlm 7.

dengan kondisi lapangan dan temuan yang muncul selama proses penelitian.

- d. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lokal dan nuansa budaya yang memengaruhi tata kelola Taman Rimbo, yang mungkin sulit ditangkap melalui pendekatan kuantitatif.

Sementara itu, alasan penulis memilih jenis penelitian deskriptif didasarkan pada tujuan untuk menggambarkan secara rinci dan akurat kondisi aktual tata kelola Taman Rimbo oleh Dinas TPHP berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Jenis penelitian ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola, tren, dan hubungan dalam pengelolaan kawasan, yang dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Penelitian deskriptif memungkinkan penyajian data yang komprehensif tentang berbagai aspek tata kelola, termasuk struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Deskripsi yang detail dan akurat dapat menjadi landasan kuat untuk merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola Taman Rimbo oleh Dinas TPHP.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Taman Rimbo di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang menjadikannya objek penelitian yang menarik dan signifikan. Taman Rimbo merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata strategis di Kota Jambi. Sebagai bagian dari pengembangan Kota Jambi dalam mengelola ruang publik dan

mengembangkan destinasi wisata perkotaan, Taman Rimbo mencerminkan implementasi kebijakan tata ruang dan pariwisata di tingkat lokal. Pengembangan Taman Rimbo menjadi objek wisata menawarkan studi kasus yang relevan tentang bagaimana ruang terbuka hijau dapat ditransformasikan menjadi destinasi wisata tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya. Lokasi ini memungkinkan analisis mendalam tentang peran Dinas TPHP dalam mengembangkan wisata berbasis agro dan konservasi lingkungan, yang menjadi tren dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

1.7.3 Fokus Penelitian

Hal yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pengembangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) dalam tata kelola Taman Rimbo sebagai kawasan objek wisata strategis di Kota Jambi.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan meliputi:

- a. Merupakan pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi.
- b. Terlibat langsung dalam proses perencanaan, implementasi, atau evaluasi program terkait Taman Rimbo.
- c. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam posisi terkait pengelolaan Taman Rimbo atau ruang terbuka hijau di Kota Jambi.

- d. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam terkait topik penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan pada penelitian ini adalah pejabat dan staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi, yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas TPHP. Memiliki pandangan strategis tentang keseluruhan program dan kebijakan dinas.
- b. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terkait langsung dengan pengelolaan tanaman di Taman Rimbo.
- c. Kepala Seksi Produksi Hortikultura. Dapat memberikan informasi spesifik tentang pengelolaan tanaman hias dan buah di Taman Rimbo.
- d. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana. Bertanggung jawab atas infrastruktur dan fasilitas di Taman Rimbo.
- e. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi. Dapat memberikan informasi tentang pengelolaan lahan dan sistem pengairan di Taman Rimbo.
- f. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Memiliki informasi tentang perencanaan program dan evaluasi kinerja terkait Taman Rimbo.
- g. Staf pelaksana program pengembangan Taman Rimbo. Terlibat langsung dalam implementasi program di lapangan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi adalah melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan terpilih,

yakni dari pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penerapan model ini dalam konteks penelitian pengembangan Dinas TPHP dalam tata kelola Taman Rimbo Kota Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dalam tahap ini, peneliti akan merangkum hasil wawancara dengan informan dari Dinas TPHP Provinsi Jambi, fokus pada informasi yang relevan dengan tata kelola dan pengembangan Taman Rimbo.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dipahami. Peneliti akan membuat matriks yang menggambarkan struktur organisasi pengelola Taman Rimbo beserta tugas dan tanggung jawabnya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap akhir ini melibatkan proses interpretasi dan penarikan makna dari data yang telah disajikan. Peneliti akan mengidentifikasi pola-pola dalam pengelolaan Taman Rimbo, misalnya kecenderungan dalam alokasi anggaran atau prioritas program pengembangan. Peneliti selanjutnya akan menarik kesimpulan tentang tantangan utama dalam tata

kelola Taman Rimbo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terakhir, peneliti akan memverifikasi temuan dengan membandingkannya dengan teori tata kelola yang ada atau praktik terbaik dari pengelolaan taman kota di daerah lain.

Dalam praktiknya, ketiga tahap ini akan dilakukan secara iteratif dan interaktif sepanjang proses penelitian. Misalnya, setelah melakukan penyajian data awal, peneliti mungkin kembali ke tahap reduksi untuk mengumpulkan atau memilah data tambahan yang diperlukan. Demikian pula, selama proses penarikan kesimpulan, peneliti mungkin perlu kembali ke data mentah atau penyajian data untuk verifikasi.

Pendekatan analisis data ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengolah informasi kompleks tentang pengembangan Dinas TPHP dalam tata kelola Taman Rimbo Kota Jambi, mengidentifikasi pola-pola penting, dan menghasilkan temuan yang mendalam dan bermakna untuk peningkatan pengelolaan taman kota di masa depan.

1.7.7 Keabsahan Data/Triangulasi

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penerapan teknik-teknik ini secara detail adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan pembandingan dan pengecekan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi sumber akan dilakukan dengan cara membandingkan data

dari individu dengan posisi berbeda dalam hierarki organisasi, yakni dengan membandingkan pernyataan kepala dinas dengan kepala bidang dan staf pelaksana. Selain itu, peneliti juga akan membandingkan perspektif pejabat senior dengan petugas lapangan di Taman Rimbo.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk memeriksa konsistensi temuan. Dalam penelitian ini, triangulasi metode akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung di Taman Rimbo, dan studi dokumentasi terkait kebijakan dan program pengembangan Taman Rimbo.